

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

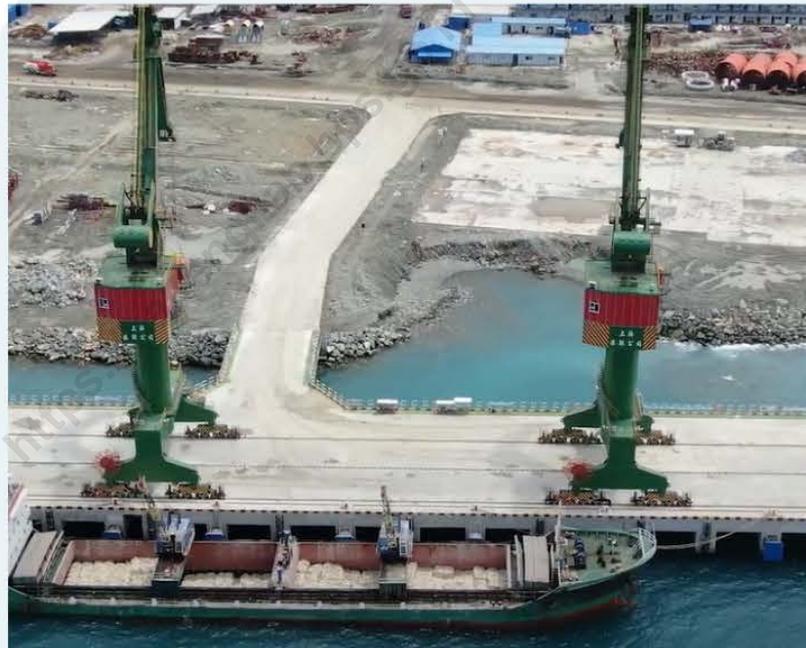
KATALOG : 9302023.8202

P D R B

2018-2022

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KATALOG : 9302023.8202

P D R B

2018-2022

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN 2018 – 2022**

ISSN: 2657-1196

Nomor Publikasi: 82020.2307

Katalog: 9302023.8202

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 66 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:

Kegiatan Pertambangan

Sumber Ilustrasi:

Youtube.com

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh:

CV. Dharmaputra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah

Menurut Pengeluaran 2018 - 2022

Pengarah:

Ahmad Abdurrahman, SST

Penanggung Jawab Umum:

Ahmad Abdurrahman, SST

Penanggung Jawab Teknis:

Ahmad Abdurrahman, SST

Penyunting:

Harjuni Ariska, SST

Penulis:

Fauzan Jodie Aldrian, S.Tr.Stat

Pengolah Data:

Fauzan Jodie Aldrian, S.Tr.Stat

Desain:

Fauzan Jodie Aldrian, S.Tr.Stat



KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2018 - 2022 merupakan publikasi yang menyajikan pembahasan mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran atau permintaan akhir. Pengeluaran ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, dan Ekspor Neto Antar Daerah.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya publikasi ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami mengharapkan tanggapan dan saran untuk meningkatkan kualitas publikasi yang akan datang.

Weda, April 2023
Kepala BPS
Kabupaten Halmahera Tengah

Ahmad Abdurrahman, SST

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB.....	6
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	11
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT).....	13
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT).....	15
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	17
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	20
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)	23
2.6 EKSPOR - IMPOR	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH MENURUT PDRB PENGELUARAN 2018 - 2022.....	27
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	29
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	37
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga	37
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT.....	39
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah.....	39
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	41
3.2.5. Perubahan Inventori.....	42
3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa	43

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 - 2022.....	45
4.1 PDRB (NOMINAL).....	47
4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB	48
4.3 AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME (APC) DAN AVERAGE PROPENSITY TO SAVE (APS).....	49
4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	50
BAB V PENUTUP.....	51
LAMPIRAN	55
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022	30
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022	31
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022	33
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran,	34
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah.....	35
Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022	36
Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah	37
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT.....	39
Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	40
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur PMTB.....	42
Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori	43
Tabel 12. Perkembangan Net Ekspor	44
Tabel 13. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita	47
Tabel 14. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	48

Tabel 15. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save	49
Tabel 16. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022.....	50

<https://haltengkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,.....	30
Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,.....	31
Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022.....	32
Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022	34
Grafik 5. Proporsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB dan Pertumbuhannya secara ADHK Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 - 2022	41

<https://haltengkab.bps.go.id>

PENJELASAN SIMBOL

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	-
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda decimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka perkiraan	:	e
Angka sementara	:	*
Angka sangat sementara	:	**
Angka diperbaiki	:	r

2. SATUAN

barel	:	158,99 liter = 1/6,2898 m ³
hektar (ha)	:	10 000 m ²
kilometer (km)	:	1 000 meter m)
knot	:	1,8523 km/jam
kuintal	:	100 kg
KWh	:	1 000 Watt hour
MWh	:	1 000 KWh
liter (untuk beras)	:	0,80 kg
ons	:	28,31 gram
ton	:	1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

TAHUKAH KAMU?

APA ITU PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan berdasarkan 3 (Tiga) Jenis Pendekatan



PENDAPATAN

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu



PRODUKSI

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah

PENGELUARAN

PDRB adalah seluruh permintaan akhir pengeluaran dari seluruh aktor ekonomi



PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini, terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep², penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian, PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini, para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini, dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal, merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia, kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB di antaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 di antaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan

cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga ke-ekonomi-an suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

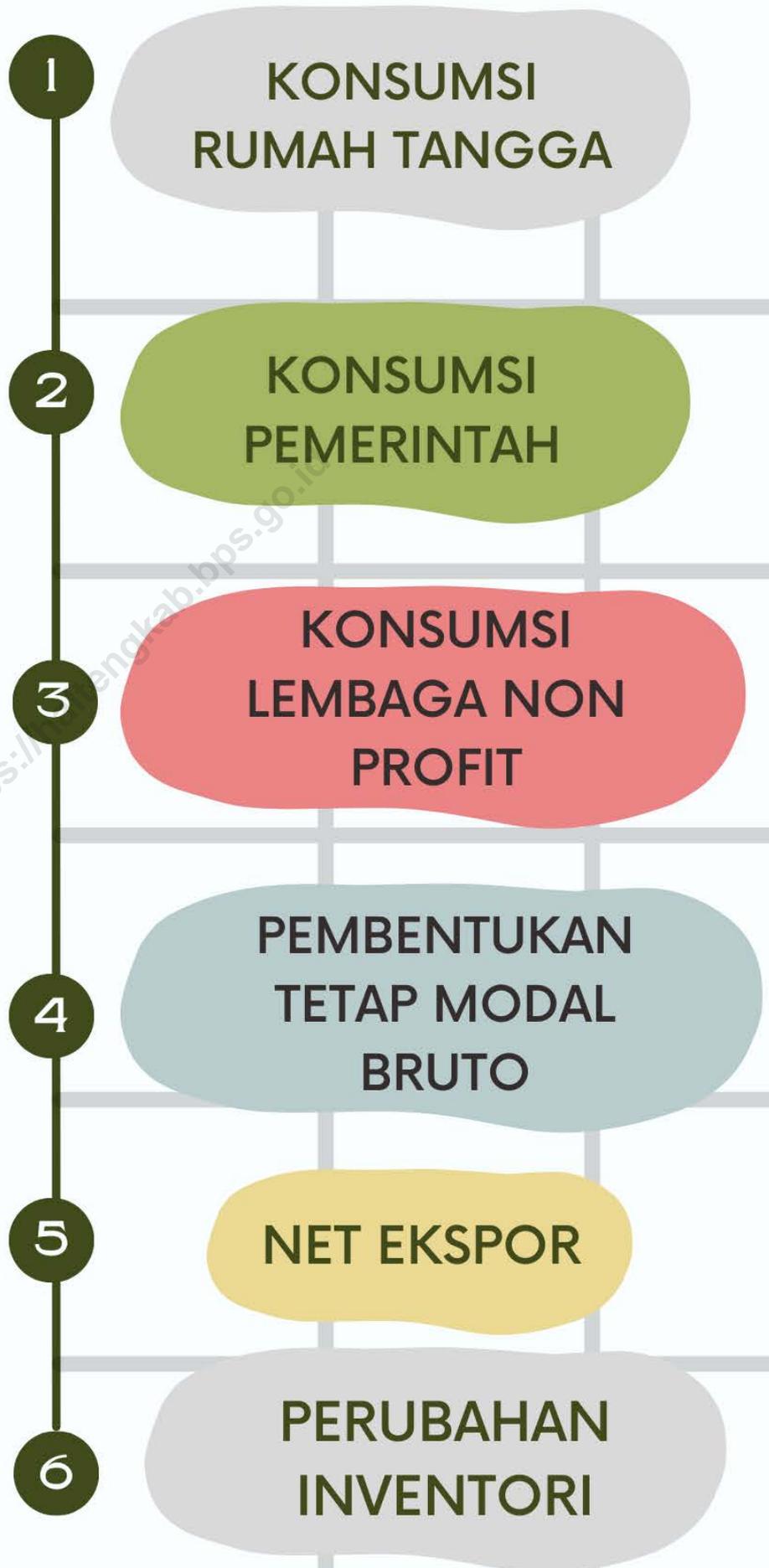


2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



KOMPONEN PENYUSUNAN PDRB MENURUT PENGELUARAN



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 12 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Peralengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2020, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON-PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Non-Profit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Pada kondisi sekarang, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind} \\ \text{purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sebagai berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan *Supply*:

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi:

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

<https://haltengkab.bps.go.id>

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -

Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

3

TINJAUAN PEREKONOMIAN

“ KOMPONEN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) / INVESTASI FISIK MEMILIKI PERTUMBUHAN YANG PALING TINGGI YAITU SEBESAR 80,91 % ”



3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2022 meningkat dari periode tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat menjadi sebesar 21.137,75 miliar rupiah dari sebelumnya 9.658,08 miliar rupiah. Kemudian jika dinilai atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100), PDRB juga meningkat yakni dari 5.246,88 miliar Rupiah di tahun 2021 menjadi 10.614,81 miliar Rupiah di tahun 2022, atau meningkat sebesar 102,31%. Nilai perhitungan angka PDRB menurut Pengeluaran menghasilkan nilai yang sama dengan PDRB menurut Lapangan Usaha meskipun dengan pendekatan yang berbeda. PDRB menurut pengeluaran menitikberatkan metodenya pada besarnya pengeluaran yang dikonsumsi oleh pelaku ekonomi.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami pemulihan perekonomian yang belum terlalu signifikan ketika masa pandemic Covid-19, perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah periode 2019 dan 2020 tetap tumbuh positif, yakni sebesar 6,36%; dan 31,93%. Pada dua tahun berikutnya, perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah mengalami pertumbuhan yang sangat besar, sebesar 161,84% dan 102,31%. Nilai pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Halmahera Tengah cukup kuat dan nilainya cukup tinggi karena di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah didominasi pertumbuhan dari dua komponen yaitu Investasi Fisik/PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), dan Net Ekspor. Selain dari kedua komponen utama tersebut, komponen lainnya memiliki catatan tersendiri, dimana komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (PK-LNPRT), dan komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) telah mengalami pertumbuhan. Hal ini cukup berbeda dibandingkan dengan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi.

Kompilasi PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah pada periode 2018 - 2022 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut:

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah
2018 - 2022**

*Table 1. GRDP at current price by Expenditure, Halmahera Tengah Regency
2018 - 2022*

(Miliar Rp/Billion Rp)					
Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	737,33	800,03	814,07	894,60	977,79
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	29,67	36,25	32,63	34,48	37,44
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	670,11	755,01	688,57	893,33	901,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	902,92	2 054,89	11 582,48	14 813,41	28 505,13
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	41,40	(6,15)	112,95	(25,4)	482,93
6. Net Ekspor/ <i>Net Export</i>	(185,75)	(1 223,04)	(9 939,00)	(6 952,71)	(9 766,89)
PDRB / GRDP	2 195,69	2 416,99	3 291,70	9 658,08	21 137,75

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Komponen yang memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku terbesar selama lima tahun terakhir, yakni komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2022 mencapai 28.505,13 miliar rupiah. Meningkatnya perkembangan komponen tersebut berasal dari investasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan di wilayah kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, serta adanya pembangunan infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan produksi seperti peningkatan jumlah smelter dan bangunan tempat tinggal karyawan dan sebagainya. Selain itu, peningkatan jumlah bangunan-bangunan baru permanen maupun semi permanen (seperti kos-kosan, kios maupun warung makan) yang terjadi di sekitar perusahaan pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah sebagai penunjang kegiatan pekerja di perusahaan juga ikut berperan dalam meningkatkan nilai tambah pada komponen tersebut.

**Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022**



Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Halmahera Tengah pada periode 2018 - 2022 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022**
*Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Halmahera Tengah Regency
2018 - 2022*

(Miliar Rp/ Billion Rp)					
Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	518,11	547,09	541,79	579,00	622,87
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	20,10	24,08	21,24	22,10	23,01
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	406,37	453,20	411,27	503,93	492,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	612,85	1 466,58	8 667,59	10 507,61	19 009,05
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	17,80	(3,89)	67,84	(14,41)	314,30
6. Net Ekspor/ <i>Net Export</i>	(147,15)	(968,16)	(7 705,90)	(6 351,36)	(9 847,40)
PDRB/GRDP	1 428,07	1 518,91	2 003,83	5 246,88	10 614,81

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Halmahera Tengah terus meningkat, yakni sebesar 1.428,07 miliar Rupiah (2018), 1.518,91 miliar Rupiah (2019), 2.003,83 miliar Rupiah (2020), 5.246,88 miliar Rupiah (2021), dan 10.614,81 miliar rupiah (2022). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif dan selalu berada di angka yang positif, yakni tumbuh 6,96 persen pada tahun 2018 dan melambat menjadi 6,36 persen pada tahun 2019. Kondisi pada 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yakni menjadi 31,93 persen dan meningkat sangat tajam di tahun 2021 menjadi 161,84 persen. Pada tahun 2022, posisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah mengalami perlambatan namun masih diatas angka nasional yakni sebesar 102,31 persen.

Grafik 2. PDRB Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022

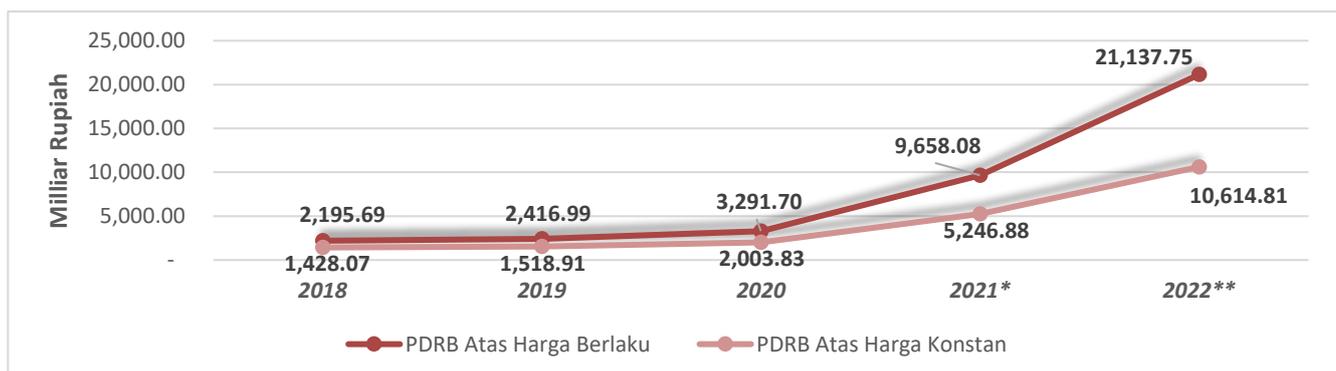


Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Mulai dari tahun 2018 sampai 2022 perkembangan nilai ekspor dan impor di Halmahera Tengah terlihat tumbuh positif dengan baik pada masing-masing komponen namun nilai ekspor belum bisa mengimbangi dengan nilai impor yang lebih tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi pekerjaan tersendiri bagi sumber pertumbuhan ekonomi yang baik dimana diperlukan adanya pengelolaan secara efektif dan efisien oleh pemerintah maupun berbagai *stakeholder* terkait dalam mengolah kekayaan alam berupa tambang dan mineral yang ada di Halmahera Tengah. Selama 3 tahun terakhir, kondisi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik sangat besar mempunyai alasan tersendiri pada masing-masing tahunnya. Pada tahun 2020 dan 2021, kegiatan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah terjadi karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai penopang kegiatan produksi tambang dan mineral sedangkan di tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pengolahan tambang dan mineral sehingga mendorong impor barang dan jasa dari luar daerah Halmahera Tengah.

Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022

Figure 3. Comparing of GRDP at current price and GRDP at Constant Price 2010, Halmehara Tengah Regency 2018 - 2022



Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E-X) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022
Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

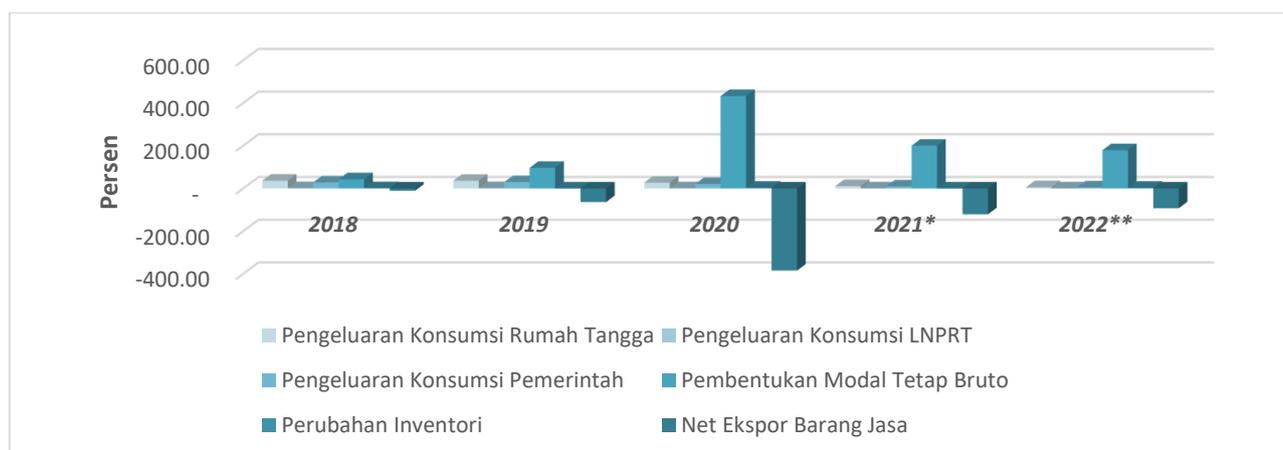
Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(%)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	33,58	33,10	24,73	9,26	4,63
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	1,35	1,50	0,99	0,36	0,18
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	30,52	31,24	20,92	9,25	4,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	41,12	85,02	351,87	153,38	134,85
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	1,89	(0,25)	3,43	(0,26)	2,28
6. Net Ekspor/ <i>Net Export</i>	(8,46)	(50,60)	(301,94)	(71,99)	(46,21)
PDRB / GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari tabel 3, pengeluaran untuk aktifitas pembentukan modal (PMTB) mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni selalu berada di atas 50 persen pada empat tahun terakhir. Selain itu, komponen net ekspor justru memiliki nilai yang negatif di setiap tahun nya yang artinya sebagian besar kebutuhan domestik belum bisa diimbangi dengan produksi barang dan jasa yang berasal dari daerah Halmahera Tengah. Namun, dari segi proporsinya komponen net ekspor memiliki proporsi yang terus meningkat dimana hal tersebut bisa diartikan kegiatan impor yang mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020, komponen net ekspor khususnya impor mengalami peningkatan aktifitas yang signifikan dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur sebagai penopang kegiatan tambang. Namun di tahun 2021, kegiatan impor tetap mendominasi namun kegiatan ekspor mulai mampu mengimbangnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi pada aktifitas tambang. Oleh karena itu, distribusi komponen net ekspor pada tahun tersebut mengalami peningkatan.

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022



Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Distribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) dan konsumsi rumah tangga (PK-RT) berada pada rentang 25 - 35 persen dan selalu menurun selama 2018 - 2022. Hal tersebut menunjukkan penurunan peran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga dalam penyerapan PDRB. Fenomena ini juga memiliki arti bahwa Konsumsi Akhir (Pemerintah, Rumah Tangga maupun LNPRT) belum mampu menggerakkan roda perekonomian kabupaten Halmahera Tengah dan masih mengandalkan Investasi Fisik yang masuk ke Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu, pada tahun 2018 - 2022 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasikan oleh komponen ekspor dan impor (Net Ekspor), menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kondisi ini dibuktikan nyata yaitu banyaknya produk barang dan jasa yang masuk ke Halmahera Tengah, baik itu dari Ternate, Halmahera Selatan dan bahkan dari luar provinsi Maluku Utara.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022
Table 4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(%)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	2,35	5,59	(0,97)	6,87	7,58
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	3,12	19,80	(11,81)	4,07	4,10
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	(2,52)	11,52	(9,25)	22,53	(2,17)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	(7,78)	139,31	491,01	21,23	80,91
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor/ <i>Net Export</i>	NA	NA	NA	NA	NA
PDRB / GRDP	6,96	6,36	31,93	161,84	102,31

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2018 - 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif dan dari tahun ke tahun menunjukkan arah positif, yakni sebesar 6,96 persen (2018); 6,36 persen (2019); 31,93 persen (2020); 161,84 persen (2021) dan terakhir 102,31 persen (2022).

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022

Table 5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	142,31	146,23	150,26	154,51	156,98
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	147,61	150,52	153,64	156,01	162,75
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	164,90	166,60	167,43	177,27	182,84
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	147,33	140,11	133,63	140,98	149,96
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	232,58	158,14	166,49	173,71	153,65
6. Net Ekspor/ <i>Net Export</i>	126,23	126,33	128,98	109,47	99,18
PDRB / GRDP	153,75	159,13	164,27	184,07	199,13

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2018 - 2022, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Pada tabel 6, dapat dilihat nilai sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran. Sumber pertumbuhan menunjukkan seberapa besar bagian dari suatu komponen dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki peran yang terbesar terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi, dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Di sisi lain, pada 2 tahun terakhir, komponen konsumsi akhir (Konsumsi Pemerintah, Rumah Tangga dan LNPRT) mengalami penurunan kontribusi terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi.

⁶ Indeks perkembangan

**Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah
2018 - 2022**

*Table 6. Source of Growth of GRDP by Expenditure Halmahera Tengah Regency
2018 - 2022*

	(%)				
Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	0,89	2,03	(0,35)	1,86	0,84
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	0,05	0,28	(0,19)	0,04	0,02
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	(0,79)	3,28	(2,76)	4,62	(0,21)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	(3,87)	59,78	474,09	91,83	162,03
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	6,10	(1,52)	4,72	(4,10)	6,26
6. Net Ekspor/ <i>Net Export</i>	4,58	(57,49)	(443,59)	67,60	(66,63)
PDRB / GRDP	6,96	6,36	31,93	161,84	102,31

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Jika dilihat dari komponen yang lain, kontribusi sektor konsumsi juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Komponen konsumsi rumah tangga memiliki peran yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan PDRB dibandingkan dengan komponen konsumsi lainnya. Pada tahun 2018 dan 2019, konsumsi rumah tangga memberikan peran terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi pada angka positif. Selain itu, pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga mengalami penurunan kontribusi sampai menyentuh angka minus 0,35 persen. Hal ini sejalan dengan dua komponen konsumsi lainnya yaitu komponen konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPRT) dan konsumsi pemerintah, yakni masing-masing memiliki peran minus 0,19 persen dan minus 2,76 persen terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah. Fenomena ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 selama tiga tahun terakhir yang berdampak penurunan konsumsi. Namun, pada tahun 2021, ketiga komponen konsumsi tersebut kembali memiliki pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor konsumsi di Kabupaten Halmahera Tengah mengalami pemulihan dan peningkatan secara perlahan.

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 2018 - 2022.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar di antara komponen konsumsi lainnya terhadap berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Halmahera Tengah, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022

Table 7. Trend of Using on Final Household Consumption of Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Total of Household Consumption</i>					
a. ADHB / <i>Current Prices (Miliar Rp/ Billion Rp)</i>	737,33	800,03	814,07	894,60	977,79
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices (Miliar Rp/ Billion Rp)</i>	518,11	547,09	541,79	579,00	622,87

**Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah
2018 - 2022 (lanjutan)**

*Table 7. Trend of Using on Final Household Consumption of Halmahera Tengah Regency
2018 - 2022 (continued)*

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	33,58	33,10	24,73	9,26	4,63
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ Average of per-capita consumption (Juta Rp/Million Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Juta Rp/ Milion Rp)	13,61	14,36	14,26	15,48	15,91
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices Juta Rp/ Milion Rp)	9,56	9,82	9,49	10,02	10,13
Pertumbuhan/ <i>Growth</i> ⁷					
a. Total konsumsi RT/ Total of Household Consumption	2,35	5,59	(0,97)	6,87	7,58
c. Perkapita/ <i>Per capita</i>	2,61	2,84	2,46	1,24	6,32
Jumlah penduduk/Number of population (orang/person)	54 190	55 728	57 101	57 809	61 460

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 - 2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami perubahan yang berfluktuatif, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2018 - 2022 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya, yaitu 33,58 persen (2018); 33,10 persen (2019); 24,73 persen (2020); 9,26 persen (2021) dan 4,63 persen (2022). Posisi proporsi konsumsi rumah tangga selalu berada di atas 30 persen pada 2018 dan 2019, namun pada tahun-tahun berikutnya selalu dibawah 20 persen. Kondisi ini menjelaskan bahwa daya beli masyarakat yang selalu mengalami perubahan sejalan dengan perubahan dinamika ekonomi yang semakin maju dan dapat mempengaruhi nilai tambah dari PDRB Kabupaten Halmahera Tengah.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Namun, hal menarik terjadi pada tahun 2020, dimana rata-rata konsumsi per

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

kapita justru menurun. Hal ini terjadi karena pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia dan menyebabkan daya beli rumah tangga khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah mengalami penurunan serta kontraksi sebesar 0,97 persen. Di tahun 2021, daya beli rumah tangga sudah kembali meningkat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 6,87 persen. Hal ini ditandai dengan pemulihan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pasca pandemi Covid-19.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022
Table 8. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB/at Current Prices (Miliar Rp/Billion Rp)	29,67	36,25	32,63	34,48	37,44
b. ADHK 2010/at Constant Prices (Miliar Rp/Billion Rp)	20,10	24,08	21,24	22,10	23,01
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,35	1,50	0,99	0,36	0,18
Pertumbuhan (ADHK 2010)	3,12	19,80	(11,81)	4,07	4,10

Keterangan: * sementara

** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Secara umum pada tahun-tahun yang merupakan tahun politik seperti tahun 2019, terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 karena adanya momen kampanye dan pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019 - 2024. Di sisi lain, pada tahun 2020, pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT justru mengalami kontraksi yang disebabkan karena pandemi covid-19.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana

ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Halmehera Tengah 2018 - 2022
Table 9. Trend of Government Final Consumption Expenditure, Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB/at Current Prices (Miliar Rp/Billion Rp)	670,11	755,01	688,57	893,33	901,36
b. ADHK 2010/at Constant Prices (Miliar Rp/Billion Rp)	406,37	453,20	411,27	503,93	492,98
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	30,52	31,24	20,92	9,25	4,26
Pertumbuhan (ADHK 2010)	(2,52)	11,52	(9,25)	22,53	(2,17)

Keterangan: * sementara ** sangat sementara
 Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selama periode 2018 - 2022, pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan porsi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah yaitu kurang lebih tiga puluh lima persen dari total PDRB Kabupaten Halmahera Tengah. Namun, di mulai tahun 2020, proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki nilai yang selalu menurun. Bahkan, di tahun 2022 hanya memberikan porsi sebesar 4,26 persen dari total PDRB Kabupaten Halmahera Tengah. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan layanan jasa pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat

merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020. Namun, jika dilihat dari pertumbuhannya yang dinilai atas dasar harga konstan, sempat terjadi kontraksi atau perlambatan pertumbuhan yang dapat diartikan bahwa proporsi pengeluaran untuk pemerintah lebih dapat dikendalikan dan dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat pembangunan secara inklusif.

Grafik 5. Proporsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB ADHB dan Pertumbuhannya secara ADHK Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 - 2022



Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018 – 2022 berfluktuasi. Terlihat pada tahun 2019 dan 2020, pengeluaran akhir yang sifatnya untuk investasi fisik cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena mulai banyaknya pembangunan baik jalan maupun bangunan di Halmahera Tengah pada tahun tersebut. Pembangunan infrastruktur yang tepat dan efisien dapat mendorong kegiatan perekonomian di Halmahera Tengah lebih baik.

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Bukti fisik secara langsung yang dapat diamati dari perkembangan PMTB atau sering disebut sebagai investasi fisik adalah mulai adanya pembangunan Smelter perusahaan tambang di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya, adanya peningkatan pembangunan infrastruktur di sekitar perusahaan tambang guna menunjang aktifitas pertambangan dan pengolahan bijih nikel juga berdampak kepada pertumbuhan PMTB yang melonjak sangat besar. Selain itu, adanya perbaikan jalan dari sirtu menjadi aspal di beberapa daerah di Weda-Patani maupun Weda-Sagea dan peningkatan pembangunan perumahan milik warga, kos-kosan serta usaha-usaha baru khususnya di sekitar daerah kecamatan Weda Tengah juga merupakan bukti adanya investasi fisik. Berikut ini disajikan perkembangan dan struktur PMTB Kabupaten Halmahera Tengah pada tabel 10:

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022**
*Table 10. Trend and Structure of GFCE, Halmahera Tengah Regency
2018 - 2022*

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	902,92	2 054,89	11 582,48	14 813,41	28 505,13
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	612,85	1 466,58	8 667,59	10 507,61	19 009,05
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	41,12	85,02	351,87	153,38	134,85
Pertumbuhan PMTB	(7,78)	139,31	491,01	21,23	80,91

Keterangan: * sementara ** sangat sementara
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok). Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori

hanya dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022**
*Table 11. Trend and Structure of Changes in Inventories, Halmahera Tengah Regency
2018 - 2022*

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	41,40	(6,15)	112,95	(25,04)	482,93
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	17,80	(3,89)	67,84	(14,41)	314,30
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,89	(0,25)	3,43	(0,26)	2,28

Keterangan: * sementara

** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Pada tahun 2019, perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar minus 6,15 miliar rupiah, yang kemudian kembali kearah positif pada tahun 2020. Kondisi perubahan inventori menunjukkan nilai negatif, berkaitan dengan banyaknya barang yang datang dan sudah terdistribusi atau terpakai dalam proses produksi. Tanda positif tersebut mengindikasikan adanya penambahan persediaan barang (stok akhir tahun lebih banyak daripada awal tahun). Fenomena ini bisa didasari pada sekitar tahun tersebut baru adanya perubahan peraturan terkait pelarangan kegiatan ekspor nikel dan mencoba memulai kembali untuk melakukan kegiatan ekspor.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Halmahera Tengah berfluktuasi antar periode dan cenderung sejalan dengan nilai perubahan inventori. Tercatat, proporsi perubahan inventori hanya bernilai positif pada tahun 2018, 2020 dan 2022 yaitu 1,89 persen 3,43 persen dan 2,28 persen. Selanjutnya pada 2019 dan 2021 bernilai negatif yaitu minus 0,25 persen, dan minus 0,26 persen. Umumnya perubahan inventori berkontribusi kecil terhadap total PDRB suatu daerah, namun nilai dan keberadaannya juga perlu menjadi perhatian karena nilai positif maupun negatif dapat menggambarkan kondisi persediaan barang dan bahan di daerah tersebut.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah, namun dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Di sisi impor, Aktivitas pengeluaran (konsumsi

rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Tabel 12. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022
Table 12. Trend of Net Export, Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor	(185,75)	(1 223,04)	(9 939,00)	(6 952,71)	(9 766,89)
a. ADHB (Miliar Rp)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	(147,15)	(968,16)	(7 705,90)	(6 351,36)	(9 847,40)
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	(8,46)	(50,60)	(301,94)	(71,99)	(46,21)

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Secara total, dalam kurun waktu 2018 - 2022 nilai net ekspor barang dan jasa atas harga berlaku maupun atas harga konstan selalu berada pada posisi negatif dari tahun ke tahun. Hal ini menjelaskan bahwa pada periode waktu tersebut nilai impor selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor barang dan jasa. Sementara itu, proporsi ekspor dalam PDRB bergerak dengan fluktuatif dimana tahun 2018 menuju 2020 cenderung bergerak mendekati arah negatif yang dalam namun setelah itu kembali bergerak pada arah mendekati nilai positif dari minus 301,94 persen pada tahun 2020 menjadi minus 46,21 persen di tahun 2022.

Tercatat pada tahun 2019 beberapa perusahaan tambang di Kabupaten Halmahera Tengah masih belum mendapat izin untuk melakukan kegiatan ekspor. Di tahun 2020, keadaan net ekspor juga semakin menurun. Fenomena ini terjadi lebih kepada nilai ekspor yang belum bisa mengimbangi kebutuhan impor barang dan jasa. Kebutuhan impor barang dan jasa disini dalam hal pembangunan infrastruktur di sekitar perusahaan tambang maupun impor bahan baku pengolahan yang digunakan oleh perusahaan tambang. Namun, pada tahun 2021, dengan adanya pembangunan smelter pada perusahaan tambang menyebabkan kegiatan pengolahan semakin berkembang sehingga nikel (*ore*) yang sudah dalam bentuk *ferronickel* sudah mulai di ekspor ke luar Provinsi Maluku Utara maupun ke luar negeri. Selain itu, aktifitas pertambangan dan pengolahan yang mengalami peningkatan, yang didukung dengan bertambahnya kuantitas barang hasil pertambangan, dapat dijadikan salah satu faktor mengapa komponen impor di setiap tahunnya selalu meningkat.

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB



DI TAHUN 2022

“

Sumber Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Halmahera Tengah
adalah Komponen Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar

162,03 %

”

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk mengukur perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 13. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022
Table 13. Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRDP, Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	2 195,69	2 416,99	3 291,70	9 658,08	21 137,75
- ADHK 2010	1 428,07	1 518,91	2 003,83	5 246,88	10 614,81
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	40,52	43,37	57,65	167,07	343,93
- ADHK 2010	26,35	27,26	35,09	90,76	172,71
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,24	3,43	28,75	158,64	90,29
Jumlah penduduk (orang)	54 190	55 728	57 101	57 809	61 460

Keterangan: * sementara

** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 14. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Halmahera Tengah 2018 - 2022**
*Table 14. Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP
Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022*

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	737,33	800,03	814,07	894,60	977,79
b. LNPRT	29,67	36,25	32,63	34,48	37,44
c. Pemerintah	670,11	755,01	688,57	893,33	901,36
Jumlah	1 437,12	1 591,29	1 535,27	1 822,41	1 916,59
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2 195,69	2 416,99	3 291,70	9 658,08	21 137,75
Proporsi	65,45	65,84	46,64	18,87	9,07

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.3 AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME (APC) DAN AVERAGE PROPENSITY TO SAVE (APS)

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$APS = \frac{S}{Y_d} \quad \text{APC} = \frac{C}{Y_d}$$

Di mana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan Y_d = Pendapatan disposabel. Perlu diketahui pula bahwa $APC + APS = 1$

Tabel 15. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Disposabel (Y_d) (Miliar Rp)	2 195,69	2 416,99	3 291,70	9 658,08	21 137,75
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	737,33	800,03	814,07	894,60	977,79
Total Konsumsi LNPRT (ADHB) (Miliar Rp)	29,67	36,25	32,63	34,48	37,44
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) (Miliar Rp)	670,11	755,01	688,57	893,33	901,36
Total Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	1 437,12	1 591,29	1 535,27	1 822,41	1 916,59
APC	0,65	0,66	0,47	0,19	0,09
Tabungan (Miliar Rp)	758,57	825,69	1 756,42	7 835,66	19 221,16
APS	0,35	0,34	0,53	0,81	0,91

Keterangan: * sementara

** sangat sementara

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 16. Incremental Capital Output Ratio
Halmahera Tengah Regency 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Milliar rupiah)	1 428,07	1 518,91	2 003,83	5 246,88	10 614,81
Perubahan (Milliar rupiah)	92,88	90,84	484,92	3 243,06	5 367,93
PMTB (ADHK 2010) (Milliar Rp)	612,85	1 466,58	8 667,59	10 507,61	19 009,05
ICOR	6,60	16,15	17,87	3,24	3,54

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

P E N U T U P



PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 s.d 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri serta perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 s.d 2022, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN



Lampiran 1. PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2018 - 2022
(Miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	737,33	800,03	814,07	894,60	977,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	29,67	36,25	32,63	34,48	37,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	670,11	755,01	688,57	893,33	901,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	902,92	2 054,89	11 582,48	14 813,41	28 505,13
5. Perubahan Inventori	41,40	(6,15)	112,95	(25,04)	482,93
6. Net Ekspor	(185,75)	(1 223,04)	(9 939,00)	(6 952,71)	(9 766,89)
P D R B	2 195,69	2 416,99	3 291,70	9 658,08	21 137,75

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Lampiran 2. PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	518,11	547,09	541,79	579,00	622,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20,10	24,08	21,24	22,10	23,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	406,37	453,20	411,27	503,93	492,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	612,85	1 466,58	8 667,59	10 507,61	19 009,05
5. Perubahan Inventori	17,80	(3,89)	67,84	(14,41)	314,30
6. Net Ekspor	(147,15)	(968,16)	(7 705,90)	(6 351,36)	(9 847,40)
P D R B	1 428,07	1 518,91	2 003,83	5 246,88	10 614,81

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	33,58	33,10	24,73	9,26	4,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,35	1,50	0,99	0,36	0,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	30,52	31,24	20,92	9,25	4,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	41,12	85,02	351,87	153,38	134,85
5. Perubahan Inventori	1,89	(0,25)	3,43	(0,26)	2,28
6. Net Ekspor	(8,46)	(50,60)	(301,94)	(71,99)	(46,21)
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Lampiran 4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,35	5,59	(0,97)	6,87	7,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,12	19,80	(11,81)	4,07	4,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(2,52)	11,52	(9,25)	22,53	(2,17)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(7,78)	139,31	491,01	21,23	80,91
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	NA	NA	NA	NA	NA
P D R B	6,96	6,36	31,93	161,84	102,31

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Lampiran 5. Indeks Implisit Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	142,31	146,23	150,26	154,51	156,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	147,61	150,52	153,64	156,01	162,75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	164,90	166,60	167,43	177,27	182,84
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	147,33	140,11	133,63	140,98	149,96
5. Perubahan Inventori	232,58	158,14	166,49	173,71	153,65
6. Net Ekspor	126,23	126,33	128,98	109,47	99,18
P D R B	153,75	159,13	164,27	184,07	199,13

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Implisit Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,70	2,76	2,75	2,83	1,60
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,91	1,97	2,08	1,54	4,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,37	1,03	0,50	5,88	3,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,05	-4,90	-4,63	5,50	6,37
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	NA	NA	NA	NA	NA
P D R B	6,29	3,50	3,23	12,05	8,18

Keterangan: * sementara ** sangat sementara

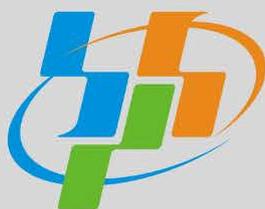
<https://haltengkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. 8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

D A T A
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Jl. Poros Weda - Payahe
Email : bps8202@bps.go.id
Homepage : <http://haltengkab.bps.go.id>

